

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Kabupaten Humbang Hasundutan**

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, yang resmi terbentuk pada tanggal 28 Juli 2003. Pemekaran tersebut didasarkan pada sejarah dan keinginan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai dengan pembentukan panitia khusus yang bertugas mengkaji proses pemekaran tersebut dari Kabupaten Tapanuli Utara. Inisiatif pemekaran ini muncul berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merespons aspirasi tersebut dengan beberapa langkah, termasuk mengikuti deklarasi pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2002, menerima audiensi dari panitia pembentukan, serta menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pembentukan Tim Peneliti. Selanjutnya, pemerintah melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, menugaskan Tim Peneliti untuk mendampingi DPRD, dan menerima berkas pengajuan usul pemekaran. Proses ini dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke kecamatan-kecamatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi berbagai tindakan seperti penyelenggaraan pertemuan dengan berbagai pihak masyarakat, penyampaian laporan kepada instansi terkait, undangan kepada anggota Komisi II DPR-RI untuk melakukan pemantauan, serta melakukan



### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas wilayah seluas 2.335,33 kilometer persegi. Secara topografi, kabupaten ini berkisar antara ketinggian 330 hingga 2.075 meter di atas permukaan laut. Dari segi letak geografis, kabupaten ini terletak di antara lintang utara 2°13' hingga 2°28' dan bujur timur 98°10' hingga 98°57'. Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki batas-batas administratif yang terdefinisi sebagai berikut: Di bagian Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan Kabupaten Samosir, Sementara di bagian Timur, batas wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara; di sisi Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah; sedangkan di bagian Barat, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan ditandai oleh topografi yang bergelombang dan berbukit, dengan ketinggian bervariasi antara 330 hingga 2075 meter di atas permukaan laut. Struktur tanah di daerah ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni datar yang mencakup sekitar 11% dari total luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, landai yang mencakup sekitar 20% dari total luas wilayah, dan curam yang mencakup sekitar 69% dari total luas wilayah. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 10 kecamatan, 153 desa, dan 1 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Pakkat, Onanganjang, Sijamapolang, Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Tarabintang, dan Baktiraja.

**Tabel 2.1.** Luas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN</b>          | <b>LUAS (Ha)</b>    |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 1         | Pakkat                    | 38.168              |
| 2         | Onanganjang               | 22.256,27           |
| 3         | Lintongnihuta             | 18.126,03           |
| 4         | Paranginan                | 4.778,06            |
| 5         | Doloksanggul              | 20.929,53           |
| 6         | Pollung                   | 32.736,46           |
| 7         | Parlilitan                | 72.774,71           |
| 8         | Tarabintang               | 24.251,98           |
| 9         | Baktiraja+Luas Danau Toba | 2.231,91 + 1.494,91 |
| 10        | Sijamapolang              | 14,018,07           |

Sumber: Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan.

### **2.1.2 Kondisi Ekonomi**

Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat lima sektor ekonomi utama, yaitu pertanian, perdagangan, konstruksi, pemerintahan, dan industri akomodasi makanan dan minuman. Pertanian memiliki peran utama sebagai penopang ekonomi memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 43,47% pada tahun 2022. Sektor perdagangan menyumbang 16,44%, konstruksi 14,65%, dan pemerintahan 10,25%, sementara akomodasi makan dan minuman berkontribusi sebesar 3,30%. Kopi menjadi komoditas unggulan dengan luas panen mencapai 9.246 hektar dan produksi mencapai 6.461 ton, data ini didokumentasikan dalam Humbahas Dalam Angka 2007. Sekitar 48,45% dari total luas lahan pertanian dan perkebunan dimanfaatkan untuk perkebunan kopi. Selain kopi, daerah ini juga terkenal dengan kemenyan, dengan luas panen mencapai 5.235 hektar dan produksi 1.278 ton, serta luas lahan

kemenyan mencapai 23,16%. Terdapat juga berbagai komoditas lain seperti karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkih, dan andaliman. Komoditas pertanian utama penduduk adalah cabe, dengan luas panen mencapai 612 hektar dan produksi 3.086 ton, mencakup 39,97% dari total luas lahan pertanian. Selain cabe, warga juga menanam andaliman, kubis, tomat, kentang, sawi, wortel, dan bawang merah. Di sektor kehutanan, Humbang Hasundutan memiliki luas hutan sekitar 159.392 hektar, terdiri dari hutan produksi sebesar 84.540 hektar dan hutan lindung sebesar 74.852 hektar. Kawasan hutan terluas terletak di Kecamatan Parlilitan, mencakup 38,58% dari total hutan keseluruhan.

Mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan berada di sektor pertanian, dengan jumlah total pekerja mencapai 75.650 orang. Di sektor manufaktur, terdapat 3.040 pekerja, semuanya adalah laki-laki, sementara tidak ada pekerja perempuan dalam sektor tersebut. Sedangkan di sektor jasa, terdapat 18.461 pekerja, dengan 9.062 pekerja laki-laki dan 9.399 pekerja perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai 87,10 persen, yang menunjukkan tingginya ketersediaan tenaga kerja. Pertumbuhan perekonomian Humbang Hasundutan antara tahun 2018 hingga 2022 mengalami pertumbuhan mencapai rata-rata 3,22%.

### **2.1.3 Kondisi Sosial Budaya**

Tradisi dan adat istiadat memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat Humbang Hasundutan, yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhur mereka. Masyarakat ini menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan.

Sebelum Kabupaten Humbang Hasundutan terbentuk, penyelesaian konflik dari skala kecil hingga besar, seperti pertikaian antar marga, senantiasa dilakukan melalui lembaga adat seperti natua-tua ni huta (tokoh adat desa), rajahuta (kepala desa), pangituai (tokoh-tokoh terkemuka), dan lain-lain, dengan tambahan lembaga baru seperti pangula ni huria (pemimpin gereja), pengurus pungan marga (organisasi marga), pengurus parsahutaon (organisasi desa). Semua pihak yang terlibat dalam konflik selalu tunduk pada keputusan yang diambil untuk penyelesaiannya. Masyarakat Humbang Hasundutan hidup dalam harmoni, baik antarsuku maupun antarumat beragama, mereka merasa saling terikat dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kerjasama terjalin di dalam masyarakat tercermin dalam konsep "Marsiadapari" atau gotong royong, yang dalam budaya Batak Toba diartikan sebagai kolaborasi dan saling bantu-membantu dalam kegiatan bersama.

Masyarakat Humbang Hasundutan memiliki kebiasaan yang menyukai gotong royong dan bersedia memberikan bantuan kerja demi membangun hubungan sosial dengan sesama. Contohnya, jika ada warga yang sedang membangun rumah, tetangga-tetangga akan dengan sukarela membantu tanpa mengharapkan bayaran. Selain itu, masyarakat di Humbang Hasundutan sangat menghargai institusi pernikahan. Mereka berusaha keras untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga perceraian jarang terjadi kecuali karena kematian pasangan. Generasi muda di Humbang Hasundutan memiliki mental yang baik dan jarang terlibat dalam konflik atau perilaku yang tidak diinginkan seperti pertengkaran di antara pelajar atau pergaulan bebas. Namun, masyarakat Humbang Hasundutan telah mengalami perubahan. Misalnya, dalam penyelesaian konflik,

mereka mulai menggunakan lembaga-lembaga peradilan negara daripada peradilan adat, yang semakin jarang digunakan. Generasi muda juga kurang memahami tradisi lokal seperti dalihan na tolu, terutama bagi mereka yang kembali dari bekerja di luar daerah. Banyak yang tidak memahami sistem kekerabatan tradisional suku Batak seperti "partuturon.

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 222 sekolah dasar (SD), 48 sekolah menengah pertama (SMP) dan 29 sekolah menengah atas (SMA). Fasilitas pendidikan yang tersedia tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Saat dilihat dari rasio murid per guru, kondisi pendidikan di kabupaten ini untuk semua tingkat masih menunjukkan kualitas yang baik, memberikan indikasi akan adanya perhatian terhadap ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai. Selain itu, peran penting sarana kesehatan juga tidak bisa diabaikan, karena telah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2017, Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki jumlah fasilitas kesehatan sebagai berikut: satu unit Rumah Sakit, empat unit Rumah Bersalin, dua belas unit Puskesmas, dua puluh tiga unit Pustu, seratus enam puluh tujuh unit poskesdes, dua ratus empat puluh sembilan unit Posyandu, sembilan unit Apotek, dan delapan belas unit Toko Obat.

#### **2.1.4 Konstelasi Politik**

Konstelasi politik Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki infrastruktur dan suprastruktur sehingga mewarnai dinamika politik lokal. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp494.305.393,00 kepada partai politik (Parpol). Bantuan keuangan diberikan kepada delapan partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Humbahas selama periode 2019-2024. Proses penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, serta Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Penting untuk dicatat bahwa delapan partai politik tersebut memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Total suara yang diperoleh oleh kedelapan partai politik tersebut pada tahun 2019 adalah sebanyak 96.347 suara.

DPRD Humbahas terdiri dari 25 anggota dari 8 partai politik yang berbeda. Dalam strukturnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara mayoritas, menunjukkan dukungan yang signifikan dari masyarakat terhadap partai tersebut. Melalui komposisi anggota yang berasal dari berbagai partai politik, DPRD Humbahas berperan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi untuk mewakili kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan di tingkat kabupaten. Mereka bertanggung jawab dalam memimpin jalannya sidang-sidang dewan serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan legislatif di DPRD Humbang Hasundutan. Berikut representasi suara mayoritas yang diperoleh oleh partai politik yang mendominasi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Tabel 2.2.** Komposisi anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

| Partai Politik        | Jumlah Kursi dalam Periode |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
|                       | 2014-2019                  | 2019-2024 |
| PKB                   | 2                          | 0         |
| GERINDRA              | 5                          | 2         |
| DPI-P                 | 3                          | 7         |
| GOLKAR                | 6                          | 5         |
| NASDEM                | 3                          | 3         |
| PERINDO               |                            | 2         |
| PSI                   |                            | 1         |
| PAN                   | 1                          | 0         |
| HANURA                | 3                          | 4         |
| DEMOKRAT              | 2                          | 1         |
| <b>Jumlah Anggota</b> | <b>25</b>                  | <b>25</b> |
| <b>Jumlah Partai</b>  | <b>8</b>                   | <b>8</b>  |

Sumber: KPU Humbang Hasundutan.

Pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan representasi dari partai politik yang mendominasi dalam struktur politik setempat. Dalam susunan kepemimpinannya, terdapat satu orang ketua dan dua orang wakil ketua, yang dipilih dari kalangan partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan anggota dewan. Mereka bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan berbagai kegiatan legislatif serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan secara optimal. Ramses Lumban Gaol, S.H. merupakan ketua dari partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-

P) , wakil ketua I yaitu Marolop Manik dari Partai Golongan Karya (Golkar) , dan Wakil Ketua II yaitu Labuan Sihombing dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pilkada Bupati Humbang Hasundutan, hanya terdapat satu calon, yaitu Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan. Pasangan Dosmar-Oloan didukung oleh enam partai politik, yakni PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan Demokrat. Menurut hasil resmi yang diumumkan pada Rabu (16/12), pasangan petahana Dosmar-Oloan berhasil mengalahkan kotak kosong dengan presentase perolehan suara mencapai 100 persen. Namun, kemenangan mereka diraih dengan margin yang tipis karena hanya unggul sedikit dari kotak kosong. Dosmar-Oloan memperoleh 51.861 suara atau 52,5 persen, sementara kotak kosong mendapatkan 46.940 suara atau 47,5 persen. Perlu dicatat bahwa jumlah suara kotak kosong ini merupakan yang tertinggi di antara 24 daerah lain yang memiliki calon tunggal.

Pasangan calon tunggal, Dosmar-Oloan, mendapat dukungan penuh dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat. Namun, keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Humbang Hasundutan. Kekecewaan ini mendorong pembentukan Gerakan Koko (Kotak Kosong) oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap dominasi calon tunggal yang dinilai merugikan prinsip demokrasi, serta sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kegagalan partai politik dalam menawarkan kader internal sebagai alternatif pasangan calon bupati-wakil bupati. Forum tersebut aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan dengan melibatkan opsi kotak kosong, serta mendirikan posko relawan untuk mendukung opsi kotak kosong dalam proses pemilihan. Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan menggelar rapat pleno

perdana untuk mengatasi fenomena politik kotak kosong. Inisiatif ini bermula dari kekecewaan atas kehadiran calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dianggap menghalangi hak-hak warga setempat. Keputusan untuk mendirikan posko pemenangan kotak kosong diambil sebagai langkah konkret oleh FPDHH. Menurut Ketua Umum FPDHH, sebanyak 1400 posko telah didirikan di berbagai wilayah dengan harapan memastikan warga dapat menggunakan hak suara mereka secara bebas dan adil, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Beberapa posko telah dibangun di lokasi strategis, seperti Desa Sihonongan di Kecamatan Paranginan, Desa Sibuntuon di Kecamatan Lintongnihuta, dan Posko di Simpang Tao, Desa Siponjot Lintongnihuta. Pilihan kotak kosong di Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil memperoleh dukungan sebanyak 46.940 suara (47,5%), yang merupakan jumlah tertinggi di antara 25 kabupaten/kota dengan calon tunggal. Dalam rentang waktu 2015-2018, Kabupaten Humbang Hasundutan menempati peringkat kedua dalam persentase suara tertinggi, setelah Kota Makassar (53,23).

## **2.2 Desa Pandumaan Sipituhuta**

Desa Pandumaan telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda, di mana pada waktu itu, desa ini dikenal dengan sebutan Pandumaan Happung (kampung) dan Nagori. Namun, setelah Indonesia merdeka, beberapa happung (kampung) kemudian digabung menjadi satu desa yang dikenal sebagai Desa Pandumaan. Asal muasal nama "Pandumaan" sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Batak, "Maduma", yang mengandung arti sejahtera, berbudi luhur, dan memiliki hati yang baik. Desa Pandumaan menjadi salah satu dari tiga belas desa yang berada di Kecamatan Pollung, sejak terpisahnya Kabupaten Humbang Hasundutan dari

Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2003. Dengan sejarah panjangnya, Desa Pandumaan telah menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang hidup dalam harmoni dan menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang turun-temurun. Sementara itu, sejak menjadi bagian Kabupaten Humbang Hasundutan desa Pandumaan telah dipimpin oleh beberapa kepala kampung. Nama kepala kampung yang pernah memimpin di desa Pandumaan yaitu: Rensus Nainggolan, Suanto Nainggolan, Suanto Nainggolan, Budiman Lumban Batu, Haposan Lumban Gaol, Siti Nurmia Lumban Gaol, Edismar Nainggolan.

### **2.2.1 Kondisi Geografis Desa Pandumaan**

Desa Pandumaan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan jarak sekitar  $\pm 7$  km dari kantor kecamatan Pollung. Wilayahnya meliputi lahan seluas sekitar 4.681,98 hektar, yang mencakup beragam ragam lingkungan, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan yang mempesona. Desa ini memiliki potensi alam yang kaya serta merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang hidup dalam keberagaman budaya dan tradisi yang kental. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Desa Pandumaan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan dalam berbagai bidang pertanian, dengan lahan produktif 2.672 Ha meliputi :

- Tanah Permukiman dengan luas 45,10 Ha
- Tanah Persawahan 187 Ha
- Tanah Perladangan 178 Ha
- Tanah Perkebunan 2.485 Ha
- Tanah Hutan 1.279,27 Ha
- Jalan, Sungai, Kuburan, dll 47,61 Ha

**Tabel 2.3.** Jumlah Perkampungan

| NO | DUSUN     | PERKAMPUNGAN  |
|----|-----------|---|
| 1  | Dusun I   | Banjar Nainggolan, Banjar Pandiangan, Banjar Lumban Gaol, Banjar sada-sada, Banjar Lumban Batu, Tambok Tolong, Lumban Torang, Lumban Ri, Huta Simanullang dan Huta Lumban Sinaga. |
| 2  | Dusun II  | Sipanguhalan, Tor Nauli, Huta Lumban Gaol, Adian Padang, Lumban Situmorang, Barisan Tigor, dan Lumban Halomoan.   |
| 3  | Dusun III | Lumban Sinambela, Lumban Sihite, Sosor Hoting, Lumban Simanullang, Huta Pandiangan dan Dalam Nauli.   |

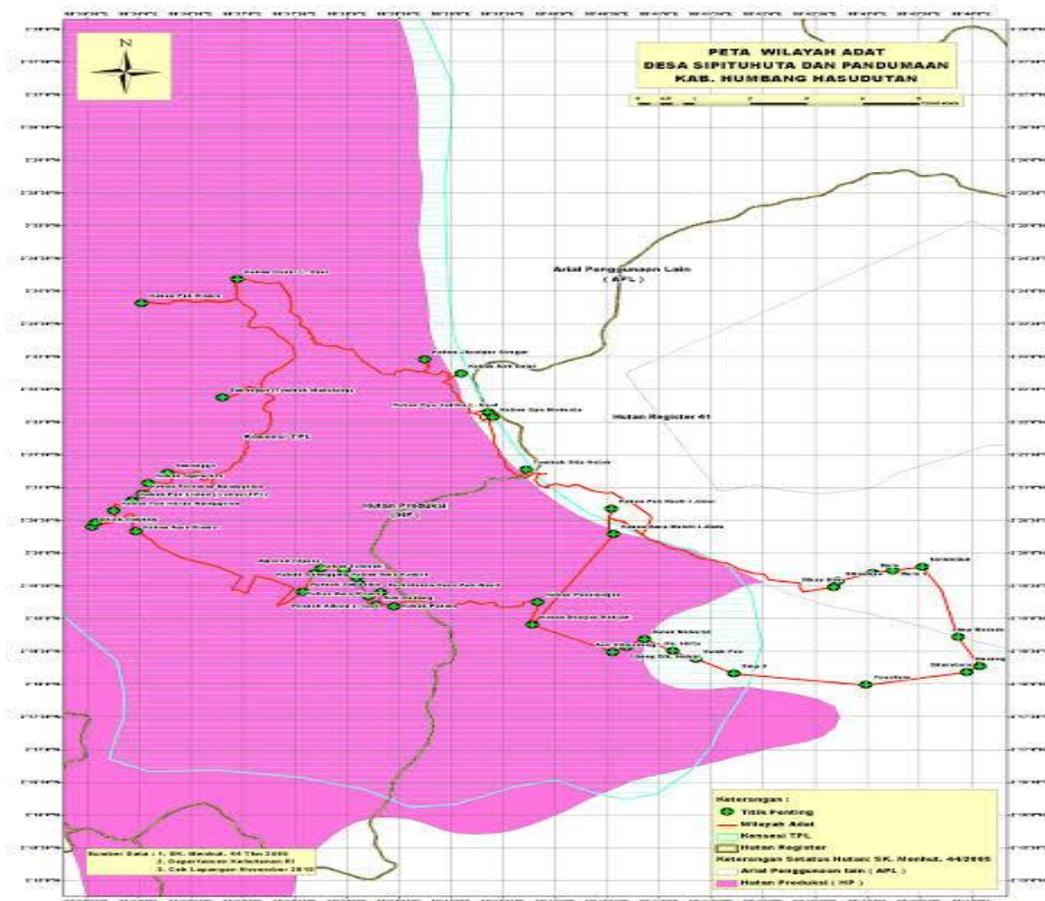
Sumber : Data Umum Desa

Letak desa Pandumaan berada disebelah Selatan Ibu Kota Kecamatan Pollung yang merupakan bagian integral dari Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah utara : Desa Pansur Batu : Kecamatan Pollung
- Sebelah Timur : Desa Sipituhuta : Kecamatan Pollung
- Sebelah Selatan : Desa Aek Nauli I dan II : Kecamatan Pollung
- Sebelah Barat : Desa Simataniari : Kecamatan Parlilitan
- **Kondisi Geografis Desa Sipituhuta**

Desa Sipituhuta, yang terletak di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, berada dalam jarak sekitar  $\pm$  3 km dari Kantor Kecamatan Pollung, menjadikannya sangat mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Desa ini dikelilingi

oleh berbagai wilayah sekitarnya, dengan batas-batas yang jelas, di antaranya: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hutapaung, Desa Pansur Batu; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doloksanggul, dan desa Aek Nauli; timur berbatasan dengan Desa Pardomuan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandumaan. Selain itu, Desa Sipituhuta juga terdiri dari beberapa dusun yang membentuk kehidupan masyarakatnya, seperti Dolok Nabolon, Lumban Dongdong, Lumban Sipon, dan Marade. Dengan ragam dusun dan keindahan alam yang dimilikinya, Desa Sipituhuta menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi penduduk serta menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayahnya.



**Gambar 2.2.** Peta Wilayah Desa Pandumaan- Sipituhuta Kabupaten Humbahas

Sumber: Aliansi Masyarakat adat Nusantara.

### **2.2.2 Kondisi Ekonomi**

Desa Pandumaan merupakan desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Dari total 294 kepala keluarga (KK) yang ada, sekitar 285 KK atau sekitar 98,00% adalah petani. Sementara itu, sebagian kecil sisanya bekerja sebagai PNS, TNI/Polisi, pedagang, karyawan perkebunan, dan profesi lainnya. Meskipun desa ini memiliki lahan perkebunan dan persawahan yang cukup luas, sebagian besar masyarakatnya masih dikategorikan sebagai miskin atau prasejahtera. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian yang modern, serta kondisi ekonomi yang kurang stabil. Meskipun demikian, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi desa ini, menyediakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandumaan dapat melibatkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, serta pemberian akses terhadap pasar yang lebih luas untuk produk pertanian lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Topografi di Desa Pandumaan memainkan peran penting dalam penyebaran kegiatan pertanian. Selain itu, jenis tanah yang dominan di Desa Pandumaan berasal dari tuf andesit, yang menghasilkan tanah podsolik dengan sifat yang sangat erosif. Meskipun tanah tersebut relatif subur karena banyak mengandung bahan organik, perlu dilakukan optimasi dalam pengelolaan tanah dan budidaya tanaman, terutama dengan menerapkan teknik yang sesuai dengan karakteristik tanah

podsolik yang erosif. Desa Pandumaan memiliki lahan yang cocok untuk ditanami padi, tanaman pangan, dan tanaman tahunan seperti kopi. Namun, masyarakat cenderung mengelola tanaman sayur-sayuran seperti tomat dan cabe. Meskipun tanah relatif subur karena kandungan organik yang tinggi, diperlukan optimisasi teknik pengelolaan tanah dan budi daya tanaman. Sebagian penduduk desa Pandumaan menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani, dengan fokus utama pada produksi padi dan tanaman kopi. Kedua jenis tanaman ini menjadi tulang punggung ekonomi desa, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui kegiatan pertanian ini, Desa Pandumaan turut berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta menyumbang dalam industri kopi, yang memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi wilayah tersebut.

### **2.2.3 Kondisi Sosial Budaya**

Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sangat memperhatikan tradisi dan warisan leluhur. Upacara adat berkaitan dengan berbagai tahapan dalam siklus hidup manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan upacara kematian, menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini dijalankan secara konsisten oleh warga desa, menunjukkan kekayaan budaya dan keberlanjutan nilai-nilai tradisional di tengah-tengah modernisasi. Kehidupan sosial masyarakat Desa Pandumaan juga tercermin dalam praktik gotong royong yang kuat. Gotong royong masih menjadi kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus, baik dalam hal perbaikan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, maupun dalam pembangunan rumah ibadah dan rumah penduduk. Hal ini menunjukkan kesatuan dan solidaritas dalam komunitas, di mana masyarakat saling membantu demi kepentingan bersama.

Kondisi masyarakat dalam bidang kesehatan tergolong cukup baik berkat adanya upaya dari Pemerintah Humbang Hasundutan yang menyediakan sarana prasarana kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (POSKESDES) serta peralatannya. Penempatan petugas kesehatan di desa juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Transportasi merupakan bagian penting dalam mobilitas masyarakat Desa Pandumaan. Sepeda motor menjadi sarana transportasi yang paling umum digunakan oleh warga, bahkan digunakan untuk mengangkut hasil pertanian atau perkebunan. Sementara itu, transportasi umum seperti bus digunakan secara musiman, terutama pada hari-hari tertentu, menunjukkan pola mobilitas yang berbeda-beda di pedesaan ini. Desa Pandumaan telah menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan jalan yang meliputi jalan desa, jalan dusun, dan jalan kampung. Meskipun beberapa ruas jalan di desa sudah diperkeras dengan aspal atau rabat beton, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum terlalui proses tersebut. Beberapa di antaranya bahkan masih berbentuk jalan setapak atau bahkan berupa tanah. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada jalan desa, namun juga merambah ke jalan-jalan dusun dan kampung di sekitarnya.

#### **2.2.4 Kondisi Pemerintahan Desa**

Struktur penyelenggara pemerintahan desa Pandumaan terdiri dari dua entitas utama, yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa, yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di tingkat desa, dipimpin oleh Kepala Desa, yang didukung oleh sejumlah staf terampil, termasuk Sekretaris Desa, serta Pelaksana Teknis Lapangan yang bertanggung jawab atas

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, dalam struktur pemerintah desa tersebut, terdapat Kepala Unsur Kewilayahan atau Kepala Dusun, yang memegang peran penting dalam koordinasi dan implementasi kebijakan di tingkat dusun. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga musyawarah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. BPD terdiri dari Pimpinan BPD, yang meliputi Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD, yang juga merangkap sebagai anggota. Selain itu, terdapat empat anggota BPD lainnya yang berperan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pandumaan. Dengan struktur yang terorganisir dengan baik, kedua entitas ini berperan aktif dalam memastikan terlaksananya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pandumaan secara optimal.

Desa Pandumaan juga memiliki beragam lembaga kemasyarakatan yang telah didirikan. Beberapa di antaranya adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, LPM Desa, serta berbagai organisasi kepemudaan yang aktif. Keberadaan serta aktifitas dari lembaga-lembaga ini mencerminkan tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya memajukan serta mengelola aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Pandumaan. Gambaran Pelayanan sebagai berikut :

### **1. Badan Permusyawaratan Desa**

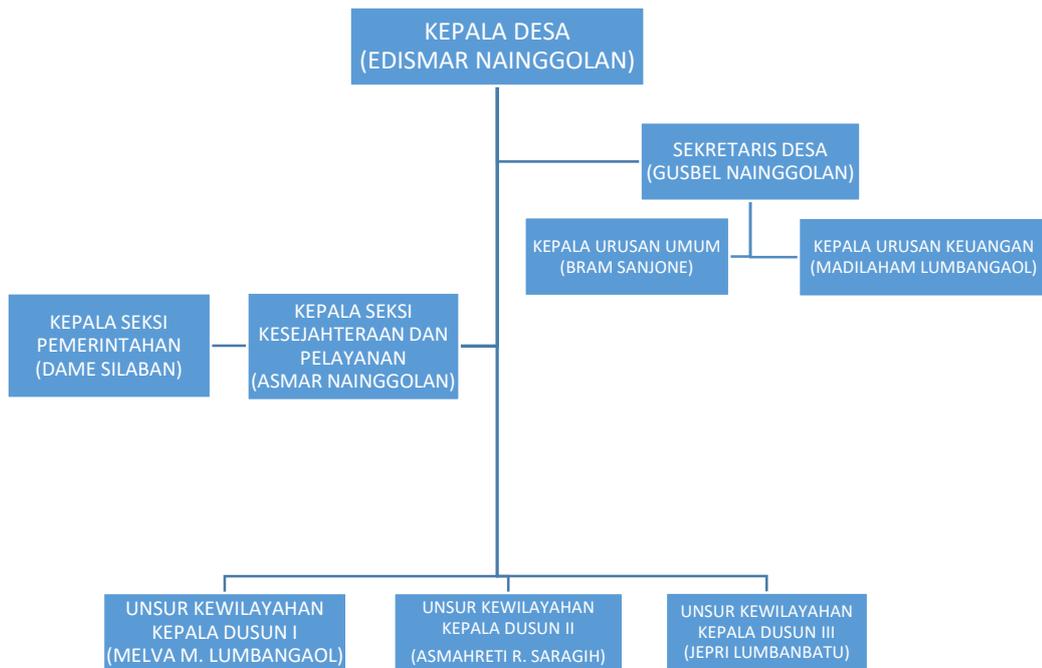
Badan Permusyawaratan Desa Pandumaan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Ketua : Alboin Nainggolan
- b. Wakil Ketua : Budiman Lumban Batu

- c. Sekretaris : Marnitta Sihite
- d. Anggota : - Samse Lumban gaol
  - Rusmerianti Sinambela
  - Liber Nainggolan
  - Paktor Nainggolan

**2. Organisasi Pemerintah Desa Pandumaan**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PANDUMAAN  
KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**3. Lembaga Kemasyarakatan Desa**

- **Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK)**
  - a. Ketua : melva Yanti Sinaga
  - b. Sekretaris : Murniaty Manalu
  - c. Bendahara : Tumiar Purba

- d. Ketua Pokja I : Marnitta Sihite
  - e. Ketua Pokja II : Rosmita Manullang
  - f. Ketua Pokja III : Hotlin Lumban Gaol
  - g. Ketua Pokja IV : Nelly Gultom
- **Karang taruna**
    - a. Ketua : Rayon Lumban Batu
    - b. Sekretaris : Rano Karno Nainggolan
    - c. Bendahara : Metha Florika Sihite
    - d. Bidang Pendidikan dan Latihan : Cahaya Tampubolon
    - e. Bidang Olahraga : Sahat Parulian Nainggolan
    - f. Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan : Irfan Nainggolan
    - g. Bidang Agama dan Kepercayaan : Gohanna Sari Sinaga

#### **4. Gambaran Pelayanan**

Organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pandumaan menjalankan fungsi mereka dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat setempat. Dalam upaya untuk memberikan layanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh warga Desa Pandumaan, mereka telah menetapkan berbagai kebijakan dan tindakan konkret, antara lain: Kantor desa dijadwalkan untuk dibuka setiap hari kerja, memastikan ketersediaan akses layanan yang konsisten bagi masyarakat. Kepala desa dan Sekretaris Desa didukung oleh Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk hadir di kantor setiap hari kerja, memastikan ketersediaan pelayanan yang efektif dan efisien; Di luar jam kerja resmi, jika ada kebutuhan mendesak dari masyarakat terkait pelayanan surat-surat, layanan tersebut tetap akan disediakan,

menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang responsif. Upaya meningkatkan disiplin dan kinerja perangkat Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi fokus, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Bantuan yang diterima dari Pemerintah akan dialokasikan dan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan program bantuan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pandumaan. Peningkatan berbagai macam kegiatan, baik dalam ranah pemerintahan, pembangunan, maupun kegiatan kemasyarakatan, menjadi prioritas, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan tetap menjadi prinsip utama, yang menjadi landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan tersebut.

### **2.3 PT. Toba Pulp Lestari**

PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang industri, termasuk produksi dan perdagangan bubur kertas, bahan kimia dasar, produk kayu, serta pengembangan konsesi hutan tanaman industri. Perusahaan multinasional memproduksi pulp dan mendirikan serta mengembangkan konsesi industri kehutanan serta sektor-sektor industri lainnya. Perusahaan ini didirikan pada bulan April 1983, dengan markas besar yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Mulai menjalankan operasi komersialnya pada bulan April 1989, PT Toba Pulp Lestari Tbk kemudian melangkah ke tahap berikutnya dengan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) pada bulan Juni 1990. Menurut pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, PT Toba Pulp Lestari Tbk memiliki ruang lingkup kegiatan yang mencakup beberapa bidang

usaha. Pertama, perusahaan ini bergerak dalam industri pulp dan bahan kimia yang mendukungnya. Kegiatan ini mencakup produksi berbagai bahan kimia. Selain itu, Perusahaan juga terlibat dalam pengusahaan hutan tanaman, termasuk mengelola hutan ekaliptus, menanam kembali tanaman ekaliptus, mengelola hutan lainnya, menanam kembali tanaman kehutanan lainnya, serta memproduksi barang-barang dari kayu juga menjadi bagian dari kegiatan usaha perusahaan, termasuk mengubah kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips) dan manufaktur berbagai produk kayu lainnya, melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan Perseroan. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam kegiatan perdagangan terbatas atau zona ekonomi khusus, baik yang berlokasi di dalam suatu area tertentu maupun di luar area tersebut. Semua kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional perusahaan serta pemasaran hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Pendirian perusahaan pulp tersebut tidak berjalan mulus, sejak awal terjadi berbagai masalah dengan masyarakat setempat yang mencakup tuduhan tentang kerusakan lahan, pembabatan hutan secara besar-besaran, dan pengambilalihan tanah yang tidak adil di wilayah tersebut. Sejarah konflik yang melingkupi pabrik pulp pertama di Indonesia ini menjadi catatan yang panjang dan kompleks. Tuntutan masyarakat mencakup sengketa tanah, penurunan kualitas udara dan air di sekitar Sungai Asahan, yang juga dihubungkan dengan adanya penyakit kulit tertentu, menurunkan produksi perusahaan, dan permasalahan pencemaran air. Selain itu, masyarakat juga menuntut pertanggungjawaban atas beberapa bencana tanah longsor di daerah tersebut, serta insiden pelepasan gas klorin beracun selama ledakan boiler yang terjadi pada tahun 1993. Demonstrasi dan tindakan hukum yang

dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986 tidak berhasil menghentikan aktivitas pabrik, yang pada akhirnya dijawab dengan tindakan represif dari aparat keamanan setempat, termasuk penahanan, penangkapan, pemukulan, penggerebekan, dan tindakan kekerasan lainnya. Situasi ini menyoroti konflik yang mendasari antara kepentingan industri dan keberlangsungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Ketidaksetaraan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya juga menjadi faktor yang memperdalam konflik. Dengan demikian, perjuangan antara pabrik pulp dan masyarakat setempat menjadi representasi dari pertarungan yang lebih besar antara pembangunan industri dan kebutuhan pelestarian lingkungan serta keadilan sosial.

PT Toba Pulp Lestari (TPL) mengklaim telah memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Klaim ini diikuti dengan keputusan perusahaan untuk kembali beroperasi dengan sistem yang diklaim ramah lingkungan. Meskipun demikian, hingga saat ini, masalah yang melibatkan PT TPL terus berlanjut tanpa solusi yang memuaskan. Masalah tersebut mencakup berbagai isu yang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat lokal. Salah satu isu utama yang terus menimbulkan kontroversi adalah masalah pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas industri PT TPL. Selain itu, deforestasi juga menjadi perhatian, dengan dugaan bahwa kegiatan perusahaan telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang berdampak luas pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Selain masalah lingkungan, PT TPL juga dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hak ulayat masyarakat adat setempat. Isu ini menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal terkait dengan

kepemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Selanjutnya, upaya perusahaan dalam mengelola pajak juga menjadi sorotan, dengan dugaan praktik permainan pajak yang telah mempengaruhi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Keberlanjutan dari masalah-masalah ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh PT TPL dalam menjalankan operasinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan, untuk menemukan solusi yang memadai dan memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak manusia. Wilayah areal yang termasuk dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari merata di sejumlah daerah di Indonesia. Wilayah-wilayah ini memiliki keanekaragaman geografis dan sumber daya alam yang menjadi potensi besar bagi aktivitas operasional perusahaan dalam pengusahaan hutan tanaman, produksi pulp dan bahan kimia, serta kegiatan perdagangan dan pemasaran.